



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta

Rapat : Komite Konsultatif KSAP
Lokas : Virtual
Tanggal : 1 Juli 2020

Agenda

2

Pertimbangan BPK atas draf PSAP

Ringkasan	Tujuan dari pembahasan pertimbangan BPK atas draf standar adalah untuk mendiskusikan masukan atas draf PSAP Pengaturan Konsesi Jasa, PSAP Properti Investasi serta PSAP Sewa.
Diskusi	Penambahan lampiran PSAP yang meliputi Panduan Penggunaan (PP), Dasar Kesimpulan (DK), Panduan Implementasi (PI), serta Contoh Ilustrasi (CI)
Dokumen pendukung	Surat Pertimbangan BPK

1. Latar Belakang

- a. KSAP telah menerima pertimbangan BPK atas draf PSAP Pengaturan Konsesi Jasa, PSAP Properti Investasi, PSAP Sewa serta PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Perubahan Estimasi serta Operasi yang Dihentikan pada tanggal 27 April 2020.
- b. Dari keempat draf PSAP tersebut, PSAP Kebijakan Akuntansi yang telah diberikan pertimbangan. Adapun dua draf PSAP yaitu PSAP Pengaturan Konsesi Jasa dan draf PSAP Properti Investasi diminta untuk diperbaiki dengan merujuk pada IPSAS. Sementara satu draf PSAP yaitu draf PSAP Sewa, BPK meminta agar KSAP menunda penyusunannya sampai terbitnya IPSAS *Lease* yang baru.
- c. Selain itu BPK juga meminta kepada KSAP untuk melengkapi draf PSAP yang sedang disusun tersebut dengan lampiran seperti: Panduan Pelaksanaan (*Application Guidance*), Dasar Kesimpulan (*Basis for Conclusions*), Panduan Implementasi (*Implementation Guidance*) serta Contoh Ilustrasi (*Illustrative Examples*).

2. Perbandingan Pengaturan IPSAS dengan SAP

- a. Adapun perbandingan kelengkapan IPSAS dengan SAP, sebagai berikut:

IPSAS	SAP
1. IPSAS	1. PSAP
2. Dilengkapi dengan:	2. Dilengkapi dengan:
(a) <i>Application Guide</i> (AG), bagian dari IPSAS;	(a) IPSAP
(b) <i>Basis for Conclusions</i> (BC)	(b) Bultek
(c) <i>Implementation Guide</i> (IG)	
(d) <i>Illustrative Examples</i> (IE)	

3. **Pertimbangan BPK**

(a) Umum

Penyusunan PSAP hendaknya dilampiri dengan Panduan Pelaksanaan (*Application Guide*), Basis Kesimpulan (*Basis for Conclusions*) serta Contoh Ilustrasi (*Illustrative Examples*)

(b) Khusus

- i. PSAP Pengaturan Konsesi Jasa dan PSAP Properti Investasi diminta untuk diperbaiki dengan merujuk pada IPSAS;
- ii. PSAP Sewa agar ditunda penyusunannya sampai terbitnya IPSAS *Lease* yang baru.
- iii. PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan dan Operasi yang Dihentikan telah diberikan pertimbangan oleh BPK.

4. **Langkah yang dilakukan KSAP**

Atas pertimbangan yang diterima, KSAP telah melakukan perbaikan draf:

(a) PSAP Perjanjian Konsesi Jasa

- Menambahkan Panduan Pelaksanaan (*Application Guide*), Basis Kesimpulan (*Basis for Conclusions*) serta Contoh Ilustrasi (*Illustrative Examples*) dalam draf PSAP
- Mengusulkan penggantian judul **PSAP Pengaturan Konsesi Jasa** menjadi **PSAP Perjanjian Konsesi Jasa**.

(b) PSAP Properti Investasi

- Menambahkan Basis Kesimpulan (*Basis for Conclusions*) dalam draf PSAP
- Menghilangkan frasa “yang diberi tugas utama/kewenangan untuk melakukan pendayagunaan aset”, dalam paragraf ruang lingkup sehingga PSAP bisa diterapkan untuk semua entitas.

(c) PSAP Sewa

KSAP menunda penyusunan PSAP Sewa sampai terbitnya IPSAS *Lease* baru yang penyusunannya masih menunggu terbitnya revisi IFRS 16 *Lease*?
Apakah Komite Konsultatif memiliki pandangan/usulan lain?

(d) PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Perubahan Estimasi, Kesalahan serta Operasi yang Dihentikan

- Menambahkan Basis Kesimpulan (*Basis for Conclusions*), Panduan Implementasi serta Contoh Ilustrasi (*Illustrative Examples*) dalam draf PSAP.

5. **Permintaan Pendapat Komite Konsultatif**

- a. Apakah Komite Konsultatif setuju dengan penambahan lampiran PSAP yang akan memberikan panduan bagi pengguna standar sebagaimana yang diusulkan oleh BPK?
- b. Apakah Komite Konsultatif setuju dengan usulan perubahan judul PSAP Pengaturan Konsesi Jasa menjadi PSAP Perjanjian Konsesi Jasa?
- c. Apakah Komite Konsultatif setuju PSAP Properti Investasi berlaku umum tidak hanya atas entitas yang “diberi tugas utama/kewenangan untuk melakukan pendayagunaan aset”?
- d. Apakah Komite Konsultatif setuju dengan penundaan penyusunan PSAP Sewa sampai dengan terbitnya IPSAS *Lease* yang baru?
- e. Apakah Komite Konsultatif setuju PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Perubahan Estimasi, Kesalahan serta Operasi yang Dihentikan ditetapkan menjadi

Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan?